

# **JEJAK DAKWAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) MEMASUKI MUHAMMADIYAH: Mencermati Kasus di Yogyakarta sebagai Fenomena Politik Dakwah**

**Nur Wahid**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*setunggal.wahid@gmail.com*



## **Abstrak**

Sebagai kelompok yang memiliki struktur, anggota, mekanisme organisasi serta fungsi-fungsi politik dan sosial keagamaan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) maupun Muhammadiyah membawa kepentingan misi dan dakwah masing-masing. PKS sebagai partai politik, fungsi-fungsi politik di antaranya berupa artikulasi kepentingan, sosialisasi politik, dan rekrutmen politik. Dibandingkan dengan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan, fungsi-fungsi politik Muhammadiyah muncul sebagai bentuk respon terhadap kondisi perpolitikan yang tengah terjadi, sebagai bentuk arahan, pengelolaan, secara struktural organisasional terhadap anggota, amal usaha yang dimiliki serta jamaah Muhammadiyah. Dalam ranah politik keduanya berbeda. Dalam ranah dakwah keduanya berhimpitan. Belakangan politik dakwah melalui kelompok Tarbiyah-PKS memasuki Muhammadiyah seperti kasus yang terjadi di Yogyakarta. Topik bahasan tulisan ini akan mencermati dakwah kelompok Tarbiyah- PKS

yang merangsek masuk ke dalam Muhammadiyah. Kasus yang terjadi dipahami sebagai gambaran dari fenomena politik dakwah PKS.

*Kata Kunci: Politik Dakwah, Tarbiyah-PKS, Muhammadiyah*

### **Abstract**

As a group that has a structure, members, organizational mechanism and religious political and social functions, the Partai Keadilan Sejahtera (PKS) and Muhammadiyah carry their respective mission and missionary interests. PKS as a political party, political functions include the articulation of interests, political socialization, and political recruitment. Compared to Muhammadiyah as a religious social organization, Muhammadiyah's political functions emerged as a form of response to the political conditions that were happening, as a form of direction, management, structurally organizational towards members, business charities owned and congregations of Muhammadiyah. In the political sphere they are different. In the realm of da'wah both coincide. Later the propaganda politics through the Tarbiyah-PKS group entered Muhammadiyah as was the case in Yogyakarta. The topic of this article will look at the da'wah mission of the Tarbiyah-PKS group that pushed into Muhammadiyah. The case that occurred was understood as a picture of the political phenomenon of PKS propaganda.

*Keywords: Political Da'wah, Tarbiyah-PKS, Muhammadiyah*



## PENDAHULUAN

Perjumpaan antara satu kelompok, organisasi-keagamaan, politik maupun dakwah dengan kelompok lain, sudah barang tentu terjadi di tengah perbedaan dan keragaman yang ada. Perjumpaan yang tengah berlangsung tersebut timbul sebagai bentuk tegur sapa, untuk saling memahami, berdialog, namun juga memungkinkan terjadi perbedaan pandangan, sampai pada kemungkinan terjadinya friksi dan konflik. Dalam kategori kepentingan politik, dalam usaha meraih kekuasaan, maupun dalam kerangka dakwah berlomba-lomba dalam kebaikan serta dalam bingkai menyeru kepada kebaikan mencegah kebatilan, akan diupayakan dengan berbagai jalan, baik lewat kultural maupun politik. Jalan secara kultural maupun jalan politik dipilih masing-masing kelompok sebagai cara beradanya serta sebagai strategi untuk bertahan hidup.

Seperti Muhammadiyah (1912) sebagai organisasi keagamaan yang reformis-modernis (*tajdid*), maupun Nahdhatul Ulama (1926) sebagai organisasi Islam tradisional (*self-consciousness traditionalism*)—dua organisasi besar Islam di Indonesia—masing-masing pernah menapaki jalan tersebut. Jalan politik keduanya lebih sebagai bentuk sikap politik organisasi atas persoalan bangsa, problem keumatan, yang jauh dari penuntutan legalisasi syariat Islam maupun Daulah Islam. Secara kultural, keduanya pun tidak secara konfrontatif mendakwahkan Islam di tengah masyarakat yang plural.

Dari segi dakwah, Muhammadiyah maupun NU, sama-sama bergerak dengan mengedepankan Islam yang moderat, dalam artian menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan sekaligus sebagai demarkasi dengan gerakan Islam yang cenderung menafikan kelompok di luar dirinya, serta yang ingin menjadikan Islam terwujud dalam bentuk negara.

Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk beragama

Islam, Indonesia kian menjadi sasaran ekspansi gerakan-gerakan Islam yang secara kultur maupun ideologi gerakannya “asing”, namun “menggoda”—selain memang punya daya tarik tersendiri—bagi sebagian kalangan Muslim sebagai perwujudan dari fenomena agama masyarakat perkotaan. Gerakan-gerakan Islam yang berkembang di Indonesia, tidak bisa lepas dari latar belakang keislaman, kondisi sosial, ekonomi, politik yang berkembang seiring mulai mekarnya demokrasi. Reformasi membuka kesempatan serta sekaligus menjadi satu titik pijak, langkah, serta terbukanya ruang bagi gerakan Islam transnasional memasuki dan mulai menancapkan pengaruh gerakan dan menebar ajaran-ajarannya.

Secara umum gerakan Islam dalam pengertian normatif-ajaran pada dasarnya adalah gerakan yang ingin menjadikan nilai-nilai Islam masuk ke dalam setiap sendi hidup dan praktik kehidupan masyarakat.

Untuk sampai ke tujuan tersebut, timbul problem pemikiran, terutama berkaitan dengan pemaknaan atas nilai Islam yang mana, yang harus dipakai dan disetujui, yang kemudian muncul banyak tafsir, serta beragam aliran pemikiran, konsep, dan praksis dalam mewujudkannya. Pada sisi yang lain, muncul dan menyebarnya gerakan Islam di Indonesia, kuat dipengaruhi (sebab) oleh perkembangan pemikiran (pembaharu) dalam Islam sendiri. Seperti pemikiran dari Ibnu Taymiyyah—lahir di Harran, Damaskus (1263–1328), Muhammad bin Abdul Wahab—lahir di Najd, Saudi Arabia (1703–1793), Jamaluddin al-Afghani—lahir di Asadabad, Afghanistan (1839–1897), Muhammad Abduh—lahir di Mesir (1849–1905), Abul A’la Maududi—lahir di India (1903–1979), Hassan al-Banna—lahir di Mesir (1906–1949), Sayyid Qutb—lahir di Mesir (1906–1966). Dari sini, nilai-nilai dalam Islam kemudian diformulasikan menjadi basis ideologi, arah pergerakan dan perjuangan, jalan jihad, sampai

tujuan untuk terwujudnya tatanan masyarakat dan negara seperti yang dibayangkan.

Islam dalam konteks gerakan adalah Islam dalam wajah Islam politik (Deepa Kumar, 2012: 20). Menurut Giller Kapel dalam buku *Jihad: The Trail of Political Islam* mendefinisikan Islam politik sebagai gejala sosial politik dipelbagai belahan dunia yang berkaitan dengan aktivitas sekelompok individu Muslim yang melakukan gerakan dengan landasan ideologis yang diyakini bersama. Dalam definisi ini, Islam politik dikonseptualisasikan terutama bukan sebagai gejala keagamaan, tetapi lebih merupakan fenomena sosial-politik yang melibatkan sekelompok individu muslim yang didasari ideologi tertentu (Noorhaidi Hasan, 2012: 2-3).

Dengan demikian, Islam membawa kepentingan politik tertentu dan kekhususan tafsir yang dipakai sebagai legitimasi. Kepentingan politik dan kekhususan tafsir yang tergal dari latar belakang para tokoh-tokoh pembaharu dalam pemikiran Islam di atas, bagaimana tipikal masing-masing gerakan, beserta kultur yang lekat dan yang akan dibawa serta secara umum terkonsentrasi pada kawasan India dan di Timur Tengah. Bila di India dan Pakistan, gerakan Islam yang berupa-wajah Jama'ah Tabligh. Di Saudi Arabia dan Yaman, corak dan kultur yang tampil dari gerakan Islam berupa-wajah Wahabi dan Salafi. Di Yordania, gerakan Islam yang muncul berupa-wajah Hizbut Tahrir. Di Mesir, gerakan Islam Ikhwanul Muslimin.

Gerakan-gerakan Islam dalam beragam rupa-wajah demikian itu, secara kultur gerakan sudah barang tentu menimbulkan persinggungan, perselisihan, konflik dengan organisasi keagamaan yang sudah lebih dulu berdiri. Secara terorganisir dan kontinu, gerakan-gerakan Islam tersebut terus bergerak secara ekspansif, infiltratif, dan salah satunya dengan membentuk partai, serta

menyuarakan berlakunya peraturan-peraturan daerah yang berlabel syariat Islam.

Gerakan Islam transnasional yang ada di Indonesia akan terus bergerak sampai cita-cita akhir dari gerakan tersebut yaitu terbentuknya Negara Islam di Indonesia. Misi dakwah (politik) tersebut menimbulkan kerisauan bagi kaum Muslim pada umumnya yang tidak menghendaki adanya gerakan semacam itu. Kekhawatiran juga muncul dari kalangan intelektual muslim dan organisasi Islam, terutama dalam hal ini Muhammadiyah dan NU. Keduanya terus berusaha bersama menangkal gerakan Islam dari luar tanah air Indonesia (sekaligus dalam mempertahankan Bhineka Tunggal Ika, UUD 45, Pancasila dan NKRI, serta kultur keislamannya), dari jaringan ideologi global seperti Wahabi dan Ikhwanul Muslimin (Abdurrahman Wahid (ed.), 2009: 40).

Berkaitan dengan hal itu, topik bahasan dalam tulisan ini akan mencermati bagaimana dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang “merangsek” masuk ke dalam rumah Muhammadiyah yang terjadi di Yogyakarta. Terkait dengan kasus yang telah lalu terjadi, informasi yang berkaitan dengannya, penulis peroleh dari pemberitaan, terutama artikel dalam majalah *Suara Muhammadiyah*, dari situs resmi Muhammadiyah ([www.muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id)) selama kurun tahun 2006-2008, dari buku, jurnal yang terkait membahas keduanya. Mengingat keduanya memiliki ranah dakwah dan politik yang berbeda, untuk melihatnya penulis meletakkan kasus yang terjadi di Yogyakarta sebagai fenomena politik dakwah. Sebagai kelompok yang memiliki struktur, anggota, mekanisme organisasi serta berkaitan dengan fungsi-fungsi politik dan sosial-keagamaan, Muhammadiyah maupun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membawa kepentingan misi masing-masing. PKS sebagai partai politik, fungsi-fungsi politik di antaranya berupa artikulasi

kepentingan, sosialisasi politik, dan rekrutmen politik (Mochtar Mas'oe'd dan Colin Mac Andrews, 1995: xiii). Dibandingkan dengan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial-keagamaan, fungsi-fungsi politik Muhammadiyah muncul sebagai bentuk respon terhadap kondisi perpolitikan yang tengah terjadi, sebagai bentuk arahan, pengelolaan, secara struktural organisasional terhadap anggota, amal usaha yang dimiliki serta jamaah Muhammadiyah.

Dalam politik, PKS memiliki gaya tersendiri. Dengan menggunakan simbol-simbol balutan agama sebagai alat berkampanye, dan sebagai bentuk transformasi dari gerakan dakwah menjadi gerakan politik “generasi muda, terdidik dan Islam” yang kental tampak terlihat. Menurut Bahtiar Effendy, jika pada masa Orde Baru, makna politik Islam didiversifikasikan ke dalam kegiatan dakwah dan sosial-ekonomi, maka apa yang terjadi dengan Partai Keadilan (Sejahtera) merupakan fenomena kebalikannya. Para aktivis dakwah kampus melakukan diversifikasi ulang tentang makna dakwah Islam. Dakwah Islam tidak terbatas lagi pada hal-hal yang bersifat sosial-keagamaan, tetapi juga politik (Bahtiar Effendy, 2001: xxx- xxix).

Dalam tubuh Muhammadiyah sendiri, berkembang politik dalam arti kekuasaan. Namun, dalam hal ini Muhammadiyah lebih kentara mengembangkan gaya politik yang akomodatif: bekerja sama dengan pemerintah, melalui fatwa-fatwa Muhammadiyah dalam menyikapi persoalan sosial-politik-keagamaan. Tetapi pada kesempatan yang lain mengkritisi kebijakan pemerintah. Menurut Haedar Nashir istilah “sikap politik yang akomodatif” atau “perilaku politik yang akomodatif” merupakan hal yang netral dalam khazanah politik (Haedar Nashir, 2006: 15), dibandingkan dengan cara menghimpitkan diri ke dalam lingkaran kekuasaan.

## JEJAK DAN INFILTRASI PKS KE DALAM MUHAMMADIYAH

Berkaitan dengan keberadaan gerakan Islam yang berupa wajah Ikhwanul Muslimin di Indonesia telah “merasuk” dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera (Ali Abdul Halim Mahmud, 2007). Sejarah singkat partai politik yang berbasis Islam—dengan nama awal Partai Keadilan (PK)—berdiri pada 20 Juli 1998 dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Latar sejarah dan keberadaan PKS di Indonesia dikemudian hari, sulit untuk bisa dilepas-pisahkan dari gerakan Tarbiyah (Ali Said Damanik, 2001: 20; M. Imdadun Rakhmat, 2008: 10). Gerakan Tarbiyah sendiri pada awal kelahirannya tahun 1970-an dan 1980-an merupakan gerakan dakwah kampus yang menggunakan sistem pembinaan yang mengacu pada *manhaj* (metode) Tarbiyah-Ikhwanul Muslimin-Mesir (Haedar Nashir, 2006: 12).

Tarbiyah dalam konsep Ikhwanul Muslimin, mengandung pengertian cara ideal dalam berinteraksi dengan fitrah manusia, baik secara langsung melalui ucapan, maupun secara tidak langsung yang ditunjukkan dengan tingkah laku, keteladanan, untuk memproses perubahan dalam diri manusia menuju kondisi yang lebih baik (Ali Abdul Halim Mahmud, 2004: 21). Gerakan pembinaan konsep Ikhwanul Muslimin di Indonesia dibuktikan dengan beragam bentuk seperti Lembaga Dakwah Kampus (LDK), dalam organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dalam kegiatan *Rohis* (rohani Islam), *Usrah* (keluarga), *Halaqah/Liqa'* (pertemuan), *Rihlah* (wisata; kemah), *Mabit* (malam bina iman dan takwa), *Daurah* (pengayaan wawasan dan pengetahuan), dibawah bimbingan *Murabbi* (pendidik; guru).

PKS sebagai gerakan Tarbiyah mulai membangun diri lewat kegiatan dakwah di kampus-kampus terkemuka di Indonesia. Di

samping juga mempromosikan diri dalam hal pemikiran-pemikiran dari kalangan Ikhwanul Muslimin Timur-Tengah melalui sejumlah media bacaan, seperti majalah *Ummi* dan *Sabili* serta lewat buku-buku terbitan *Gema Insani Press*, *Pustaka Al-Kautsar*, *Robbani Press*, *Itishom*, *Era Intermedia*, *Asy Syaamil*, yang sekaligus menjadi wahana pembinaan, media informasi dan komunikasi pemikiran para tokoh-tokoh kalangan Ikhwanul Muslimin (Ali Said Damanik, 2001:175). Semakin ke sini, semakin kentara bahwa antara gerakan Tarbiyah, Ikhwanul Muslimin dan PKS sulit dilepas-pisahkan: ketiganya mengait satu sama lain (Yon Machmudi, 2005: 23; M. Imdadun Rahmat, 2005: 83).

Dalam perkembangannya, PKS mengusung jargon memperjuangkan dan membela Islam dalam kerangka *amar ma'ruf nahi munkar* sedikit banyak mengubah wajah Islam Indonesia (Abdurrahman Wahid (ed.), 2009: 20). Namun, keberhasilan PKS mengubah wajah Islam, sampai pula mengubah haluan kalangan Muhammadiyah, tidak serta merta berjalan mulus, bebas dari persinggungan, gesekan, friksi maupun konflik dengan kelompok lain—terutama kaitannya dengan Muhammadiyah—yang sudah lebih dulu mewarnai tradisi dan kehidupan keagamaan masyarakat Muslim Indonesia.

Perjumpaan PKS terutama dengan Muhammadiyah menyasar pada lahan garap dakwah (*amar ma'ruf nahi munkar*) keduanya yang berhimpitan, dalam skala tertentu sulit untuk dibedakan secara tegas. Infiltrasi PKS ke dalam Muhammadiyah mula-mula dari kader-kader Tarbiyah menuggangi amal usaha, masjid, lembaga pendidikan, kesehatan dan fasilitas lain milik Muhammadiyah seperti yang terjadi di Temanggung (Bardrun Mustofa, 2006: 5), dalam kasus Masjid Al-Muttaqun, di Prambanan, Klaten, pasca gempa bumi tahun 2006 (Ari Nur Azizah dan Ma'arif Jamuin, 2012: 219-220).

Di Yogyakarta, infiltrasi PKS ke dalam Muhammadiyah sampai terjadi “migrasi jama’ah”. Secara kongkrit, dari catatan Asrori Ma’ruf memberi gambaran adanya aktivitas Ikhwanul Muslimin (PKS) melalui kadernya, yang semula adalah kader Nasyiatul Aisyiyah (NA), terjadi dalam lembaga setingkat Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PDNA). Ma’ruf menyampaikan bahwa:

Pada sebuah penyelenggaraan Rapat Kerja PDNA Kab. Bantul bulan Ramadan 1426 H/Oktober 2005, tampil seorang kader NA yang telah beralih ke PKS bernama [inisial] AW, anak Hj. Zzm Ketua Majelis Tabligh PWA DIY, dengan sikap tegar dan percaya diri menyampaikan argumentasi sikap “*Apa salahnya seorang kader NA untuk memahami dan kemudian mengikuti ideologi lain, termasuk Ikhwanul Muslimin, sekalipun?*”... Apalagi disertai pula menyebutkan ibundanya yang seorang aktivis PW Aisyiyah Propinsi DIY (Asrori Ma’ruf dalam Zakiyuddin Baidhawiy dkk, 2007: 41-42).

Kasus terjadinya “migrasi jama’ah” menimpa struktur kepengurusan Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyiah (PCNA) Kec. Bantul, periode 2004-2006.

Pada awalnya surat masuk dari Ketua 1 PCNA Kec. Bantul, berinisial TWD pada tanggal 12 Agustus 2005, yang berisi tentang pengunduran diri. Dalam suratnya itu yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua PCNA Kec. Bantul pada periode 2004-2006 sembari menyampaikan permintaan maafnya karena tidak bisa meneruskan mengemban amanah.

Ternyata dua belas hari kemudian pengunduran diri ketua itu diikuti oleh sebanyak 13 (tiga belas) fungsionaris PCNA Kec. Bantul... Klausul dalam surat mereka itu ternyata merasa lebih mantap untuk memilih jalan dakwah dengan memelihara nilai-nilai *syar’i*. Akhwat (demikian ini menurut istilah dan bahasa mereka), sedang istilah bagi rekan-rekan pria mereka sebut ikhwan yang tentu saja kependekan dan kebanggaan dari Ikhwanul Muslimin (Asrori Ma’ruf

dalam Zakiyuddin Baidhawiy dkk, 2007: 43-44).

Infiltrasi yang dilakukan PKS dalam tubuh Muhammadiyah yang lain disampaikan oleh Farid Setiawan. Dalam artikel yang pertama—dimuat *Suara Muhammadiyah*—Farid menganggapi tulisan Abdul Munir Mulkan tentang apa yang terjadi di Sendang Ayu (Abdul Munir Mulkan, 2006: 23). Farid menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh kader-kader Tarbiyah (PKS) yang “menggaskan” masjid Muhammadiyah pada kasus Sendang Ayu terindikasi juga menimpa Mu’alimin-Mu’alimat di Yogyakarta. Masuknya PKS ke dalam tubuh Muhammadiyah bekerja seperti “virus”. Ia akan menyebar, bergerak senyap, dan tanda diduga, tahu-tahu sudah beralih begitu saja. Farid mendesak agar Muhammadiyah segera mengampulasi “virus Tarbiyah” (Farid Setiawan, 2006; Abdurrahman Wahid (ed.), 2009: 24).

Berselang dua bulan kemudian, artikel kedua dari Farid Setiawan dimuat *Suara Muhammadiyah* menyoroti tentang “virus Tarbiyah” yang tengah menjangkiti Sekolah/Madrasah Mu’alimin dan Mu’alimat milik Muhammadiyah. Dalam tulisannya, Farid menyampaikan bahwa:

... Transformasi ideologi di kedua madrasah tersebut, lama-kelamaan mulai memudar dan bahkan mulai tidak kelihatan. Perubahan ini di samping karena tingginya persaingan serta cuaca global yang kurang mendukung perkembangannya madrasah, juga karena mewabahnya “virus tarbiyah” yang makin menggurita. “Virus tarbiyah” tersebut sebagian besar memasuki urat nadi kepengurusan madrasah, dari guru sampai pendamping asrama yang biasa disebut *musyrif* dan *musyifah*.

Dalam bentuk kaderisasi, mereka cenderung menggunakan sistem yang berbeda dengan Muhammadiyah seperti *Daurah*, *Liqa'*, *Usrah*, *Daulah Islamiyah* serta doktrin *Jihad fi Sabilillah* yang diambil sebagai jargon suci dalam membakar semangat kader. Para fungsionaris “virus tarbiyah” tersebut sangat

intens dalam membina, mendampingi serta mendidik santri-santri madrasah, untuk kepentingan menjaring kader-kader partainya yang berideologi lain itu (Farid Setiawan, 2006: 28-29).

Untuk mengatasi masalah tersebut, Farid mengusulkan tiga langkah penanganan. Pertama, pembubaran kedua madrasah, serta menggantikannya dengan madrasah baru yang disertai pendampingan secara langsung dan total. Kedua, merombak sistem, kurikulum serta seluruh jajaran pengurus. Ketiga, melakukan pembedayaan maksimal terhadap organisasi otonom Muhammadiyah (Farid Setiawan, 2006: 29). Apa yang diutarakan Farid dalam tulisannya terutama menyangkut kebenaran fakta di lapangan dan ketiga gagasan langkah penanganan, mendapat tanggapan yang beragam, pro dan kontra, dari kalangan Muhammadiyah.

Sejak dimuatnya beberapa tulisan dalam *Suara Muhammadiyah*—selama kurun tahun 2005-2006 dan beberapa kasus di daerah-daerah sebelum dan sesudahnya—menegaskan bahwa gerakan Tarbiyah (PKS) memang sudah merasuk dalam tubuh Muhammadiyah. Terbitnya buku karya Haedar Nashir tentang *Manifestasi Gerakan Tarbiyah: Bagaimana Sikap Muhammadiyah?* tahun 2006 yang “didasarkan atas sejumlah kasus masuknya gerakan Tarbiyah di sejumlah lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah” menegaskan hal tersebut (Haedar Nashir, 2006: xii). Fakta yang berkembang dilapangan disampaikan dalam buku tersebut, antara lain: *Pertama*, Adanya aktivis sekaligus juga pekerja/pegawai/personil yang berada di amal usaha Muhammadiyah kemudian mengembangkan kegiatan-kegiatan pembinaan Tarbiyah, baik secara langsung maupun tertutup.

*Kedua*, Mereka yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah dan diketahui sebagai aktivis gerakan dan partai politik Islam lain, yang mengembangkan amal usaha Muhammadiyah seperti

mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu, TK Islam Terpadu, dan sejenisnya yang menimbulkan pertanyaan mengenai komitmennya berada di lembaga amal usaha Muhammadiyah, yang semestinya ikut membersarkan Muhammadiyah atau amal usaha milik Muhammadiyah.

*Ketiga*, Mereka yang berada di amal usaha atau lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah menganggap Muhammadiyah dan diidikasikan memiliki simpati, kecenderungan, atau afiliasi pada paham dan partai politik Islam tertentu dengan mengembangkan persepsi atau pandangan yang tidak positif mengenai Muhammadiyah seperti menyatakan Muhammadiyah “bukan agama” untuk menunjukkan tidak perlunya berkiprah secara paham/ideologi dengan Muhammadiyah, tidak perlunya Muhammadiyah mengikat orang yang berada di amal usaha untuk mengikuti Muhammadiyah, dan lebih baik berkiprah dengan paham lain yang dipandang sebagai gerakan Islam alternatif yang dianggap baik.

*Keempat*, Adanya pembelaan dari sebagian kalangan Muhammadiyah ketika masalah Tarbiyah yang masuk di lingkungan/ rumah Muhammadiyah dipersoalkan, bahkan dengan menunjukkan hal-hal positif dari Tarbiyah, seraya sambil menyalahkan Muhammadiyah sehingga tinggal (eksodus) sebagian kader atau aktivisnya. Pembelaan terhadap Tarbiyah tersebut bahkan dengan mencari legitimasi bahwa yang mempersoalkan kehadiran Tarbiyah sebagai pihak yang sedang mengembangkan “paham lain”—yang dimaksudkan sebagai paham liberal—yang semakin mengokohkan dalih dukungan atau pembelaannya terhadap Tarbiyah.

*Kelima*, Muncul pertanyaan yang semangatnya terkesan membela kehadiran Tarviyah di tubuh Muhammadiyah, apakah betul ideologi Tarbiyah sebagai “virus” yang merongrong ideologi Muhammadiyah?

*Keenam*, Adanya keresahan di sejumlah daerah mengenai kehadiran pengembangan paham Tarbiyah dan ideologi PKS di sementara lingkungan Muhammadiyah, baik di Persyarikatan maupun amal usahanya, yang bersifat faktual atau nyata dan tidak mengada-ada, yang menuntut ketegasan sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (Haedar Nashir, 2006: 39-41).

Masalah lain yang menjadi perhatian Nashir berkaitan bukan sekedar perbedaan atau persamaan paham agama maupun ideologi, juga bukan sekedar soal *uhkuwah* atau tidak *uhkuwah*, namun menyangkut etika gerakan sekaligus ikhtiar saling menghormati sesama komponen umat Islam. Apa yang diungkapkan oleh Nashir tersebut dalam bentuk nyatanya adalah seperti kasus perbedaan waktu salat Idul Fitri maupun Idul Adha, yang menyebabkan dualisme dalam Muhammadiyah (Haedar Nashir, 2006: 43). Puncaknya adalah keluarnya Surat Keputusan Pimpinan Pusat (SKPP) Muhammadiyah terkait jalan dakwah yang dilakukan PKS dalam tubuh Muhammadiyah.

SKPP Muhammadiyah Nomor: 149/Kep/I.0/B/2006 tentang: Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mengenai Konsolidasi Organisasi dan Amal Usaha Muhammadiyah. Dalam SKPP ini memutuskan sepuluh poin ketetapan, pada keputusan poin ketiga, dinyatakan bahwa:

“Segenap anggota Muhammadiyah perlu menyadari, memahami, dan bersikap kritis bahwa seluruh partai politik di negeri ini, termasuk partai politik yang mengklaim diri atau mengembangkan sayap/kegiatan dakwah seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah benar-benar partai politik. Setiap partai politik berorientasi meraih kekuasaan politik. Karena itu, dalam menghadapi partai politik manapun kita harus tetap berpijak pada Khittah Muhammadiyah dan harus membebaskan diri dari, serta tidak menghimpitkan diri dengan misi, kepentingan, kegiatan, dan tujuan partai

politik tersebut.”

Dengan keluarnya SKPP tersebut menegaskan bahwa PKS sebagai partai politik, yang bersayap dakwah ber-*manhaj* Tarbiyah-Ikhwanul Muslimin telah merecoki dan memasuki rumah Muhammadiyah. SKPP tersebut juga sebagai bentuk sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait kasus yang menimpa tubuh Muhammadiyah.

## **PENUTUP**

Dari kasus yang terjadi di Yogyakarta, beberapa kasus menunjukkan infiltrasi PKS ke dalam Muhammadiyah, seperti yang menimpa struktur kepengurusan Pimpinan Cabang Nasyyatul Aisyiah (PCNA) Kec. Bantul, periode 2004–2006. Fenomena yang tampak darinya adalah kenyataan dilapangan, sebagaimana yang disampaikan oleh Asrori Ma'ruf. Ma'ruf menyaksikan fenomena itu sendiri. Artinya untuk menunjuk bagaimana infiltrasi yang dilakukan PKS ke dalam Muhammadiyah, tampak di sana, tidak sekedar hemburan angin lalu.

Dalam kasus yang menimpa Madrasah Mu'alimin–Mu'alimat Yogyakarta sebagaimana yang ulas oleh Farid Setiawan lebih merupakan pandangan dari penulisnya sendiri, disamping tidak menampilkan bukti menyebarnya “virus Tarbiyah”. Secara faktual Farid hanya menampilkan sebuah pengamatannya terhadap keberadaan Madrasah Mu'alimin–Mu'alimat. Harus diakui juga bahwa untuk menunjuk bagaimana fenomena dari “virus Tarbiyah” tampak dalam kehidupan Madrasah: sulit untuk ditentukan indikasinya. Sebab hal tersebut bekerja dalam ranah kesadaran, pemikiran, dan gerakan yang muncul dari para “guru sampai pendamping asrama yang biasa disebut *musyrif* dan *musyifah*”. Apa yang tampak dari ulasan Farid lebih untuk menyatakan bahwa “virus

Tarbiyah” memang perlu dan seharusnya diwaspadai bagi kalangan Muhammadiyah.

Dari segi politik-keagamaan, dakwah PKS yang merangsek masuk ke rumah Muhammadiyah merupakan wujud dari keberadaan PKS sebagai partai politik yang bersayap dakwah. Dalam bingkai dakwah, politik dilancarkan oleh PKS. Dengan demikian antara politik dan dakwah keagamaan berjalan beriringan. Pesona dakwah PKS secara faktual merupakan buah dari *manhaj* (metode) yang selama ini PKS lakukan dalam membentuk pribadi-pribadi islami. Hal ini didukung dengan banyaknya kegiatan, pendidikan, pertemuan dan dalam lingkup ke-tarbiyah-an. Apa yang tampak secara faktual dari PKS dalam arti pribadi-pribadi islami beserta atribut yang lekat padanya, merupakan buah tampakan dari *manhaj* Tarbiyah-PKS dan secara simultan berjalan di atas dua kaki, yaitu politik dan dakwah.

Langkah PKS yang memasuki rumah Muhammadiyah secara infiltratif menunjukkan bahwa PKS sebagai partai politik yang bersayap dakwah sulit untuk dilepaskan-pisahkan. Dengan kata lain, gerak mana yang dalam arti politik serta gerak mana yang dalam rangka “menyeru kepada kebaikan, dan mencegah kepada kebatilan” keduanya berkelindan. Dari kasus yang terjadi di Yogyakarta menunjukkan langkah menggaet jamaah Muhammadiyah.



## BIBLIOGRAFI

- Abdul Halim Mahmud, Ali, *Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin*, Solo: Era Intermedia, 2004.
- , *Ikhwanul Muslimin: Konsep Gerakan Terpadu*, Jilid I&2, (judul asli: *Manhaj at-Tarbiyah inda al-Ikhwanul Muslimin*) penj. Syafril Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Al-Hamdi, Rihdo, “Ber-*tabayyun*-lah Atas Soal Mu’alimin dan Mu’alimat (Tanggapanuntuk Tulisan Farid Setiawan)”, dalam *Suara Muhammadiyah*, Edisi 16-31 Mei 2006.
- Hasan, Noorhaidi, *Islam Politik di Dunia Kontemporer: Konsep, Geneologi dan Teori*, Yogyakarta: SukaPress, 2012.
- Hawaa, Sa’id, *Membina Angkatan Muhajid: Studi Analitis atas Konsep Dakwah Hasan Al-Banna dalam Risalah Ta’lim*, Solo: Intermedia, 2005.
- Kumar, Deepa, *Islam Politik Sebuah Analisis Marxis (Political Islam: A Marxist Analysis)*, penj. Fitri Mohan, Yogyakarta: Resist Book, 2012.
- Ma’ruf, Asrori, “Gesekan Ideologi Ikhwanul Muslimin (PKS) dengan Muhammadiyah” dalam Zakiyuddin Baidhawy dkk, *Migrasi Jamaah: Tantangan Dakwah Muhammadiyah Jelang Satu Abad*, Yogyakarta: Panji, 2007.
- Mas’oed, Mochtar dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Machmudi, Yon, *Partai Keadilan: Wajah Baru Islam Politik Indonesia*, Bandung: Harakatuna Publishing, 2005.
- Muhammad Furkan, Aay, *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*, Bandung: Teraju, 2004.
- Muin Malilang, Abdul, “Polemik Madrasah Mu’aliman dan

- Mu'alimat, Hiperbolis atau Keprihatinan?", dalam *Suara Muhammadiyah*, Edisi 16-31 Mei 2006.
- Munir Mulckhan, Abdul, "Sendang Ayu; Pergulatan Muhammadiyah di Kaki Bukit Barisan", dalam *Suara Muhammadiyah*, Edisi 1-15 Januari 2006.
- Nashir, Haedar, *Manifestasi Gerakan Tarbiyah Bagaimana Sikap Muhammadiyah?*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006.
- Rakhmat, M. Imdadun, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- , *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Said Damanik, Ali, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2001.
- Setiawan, Farid, "Ahmad Dahlan Menangis (Tanggapan terhadap Tulisan Abdul Munir Mulkan)", dalam *Suara Muhammadiyah*, Edisi 20 Februari 2006.
- , "Tiga Upaya Menyelamatkan Mu'alimin dan Mu'alimat", dalam *Suara Muhammadiyah*, Edisi 1-15 April 2006.
- Sucipto, "Sekolah Kader Tidak Boleh Mati (Tanggapan untuk Tulisan Farid Setiawan)", dalam *Suara Muhammadiyah*, Edisi 16-31 Mei 2006.
- Wahid, Abdurrahman (ed), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, The Wahid Institute dan Maarif Institute, 2009.

